

Pengelolaan Diklat pada Tim Pendamping Keluarga dalam Pencegahan Stunting di BKKBN DIY

Mufidatun Dhani Rahmawati^{1*}, Adin Ariyanti Dewi², Erma Kusumawardani³

**Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta*

**mufidatundhani.2020@student.uny.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Diklat Pada Tim Pendamping Keluarga dalam pencegahan stunting di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Metode penelitian dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Permasalahan ada pada fokus yaitu Efektivitas Pengelolaan Diklat pada Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana di BKKBN DIY. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian ini staf penyelenggara diklat dan sub koor program kerja di bidang pendidikan dan pelatihan di BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) perencanaan diklat pada Tim Pendamping Keluarga (TPK) di BKKBN DIY meliputi analisis kebutuhan diklat, merumuskan tujuan diklat, menyusun rencana pelatihan, penyusunan bahan ajar, penggunaan media pembelajaran, dan pengorganisasian 2) pelaksanaan diklat yang dilakukan pada Tim Pendamping Keluarga meliputi tugas Tim Pendamping Keluarga yaitu melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki kerawanan terhadap stunting, penggunaan aplikasi Elsimil sebagai media atau bahan ajar yang digunakan untuk membantu proses pendampingan, Tim Pendamping keluarga bersama Penyuluh KB menggunakan media Poster Penting sebagai alat pemantauan tinggi badan dan tiga pesan kunci mengenai stunting, serta mekanisme dan langkah kerja Tim Pendamping Keluarga. 3) evaluasi diklat pada Tim Pendamping Keluarga meliputi peningkatan kemampuan TPK dalam melakukan pendampingan di lapangan, kemampuan mengaitkan materi diklat untuk menunjang tugas pendampingan, dan perubahan perilaku sampai kepada perilaku sasaran yang didampingi.

Kata Kunci: *Pengelolaan diklat, Tim Pendamping Keluarga, Stunting, BKKBN*

Management of Education and Training for Family Assistance Teams in Stunting Prevention at BKKBN DIY

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the management of Education and Training for the Family Assistance Team in preventing stunting in the Population and Family Planning Board (BKKBN). The research method in this research uses descriptive qualitative. The problem lies in the focus, namely the Effectiveness of Education and Training Management at the Center for Population and Family Planning Education and Training at BKKBN DIY. Data collection techniques in this study are interviews, observation and documentation. The subject of this research is training staff and sub-coordinators of work programs in the field of education and training at the BKKBN Special Region of Yogyakarta. The results of this study indicate 1) training

planning for the Family Assistance Team (TPK) at BKKBN DIY includes analyzing training needs, formulating training objectives, preparing training plans, preparing teaching materials, using learning media, and organizing 2) implementing training conducted on the Assistance Team Families include the duties of the Family Assistance Team, namely providing assistance to families who are prone to stunting, using the Elsimil application as a medium or teaching material used to assist the mentoring process, the Family Assistance Team together with the Family Planning Instructor use the Important Poster media as a height monitoring tool and three messages key issues regarding stunting, as well as the mechanisms and work steps of the Family Assistance Team. 3) evaluation of education and training for the Family Assistance Team includes increasing the ability of TPK to carry out assistance in the field, the ability to relate training materials to support mentoring tasks, and changing behavior up to the target behavior being assisted.

Keywords: Training management, Family Assistance Team, Stunting, BKKBN

PENDAHULUAN

Pemberian layanan publik yang berkualitas merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu tuntutan reformasi yaitu kinerja pelayanan publik yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Upaya peningkatan pelayanan publik akan terus menerus dilakukan karena masih terdapat penilaian negatif dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan. Dalam membangun kepercayaan publik maka para pelaku sdm dituntut untuk mampu berpikir, bersikap, dan mbertindak secara profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam mmeningkatkan profesionalitas, maka kemampuan sdm harus selalu dikembangkan.

Optimalisasi perencanaan program diklat, perlu dilakukan identifikasi faktor yang mendorong dan penghambat karena mempunyai kolerasi yang erat dengan perencanaan program diklat pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN menyelenggarakan fungsi salah satunya penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Lebih lanjut, BKKBN melalui deputi bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan (lalitbang) serta melalui bidang pelatihan dan pengembangan (latbang) yang ada di setiap kantor

perwakilan BKKBN provinsi, selalu berupaya meningkatkan kompetensi pegawai BKKBN melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Diklat yang diberikan tidak terbatas pada pegawai yang ada dikantor tetapi juga untuk seluruh pegawai BKKBN yang ada dilini lapangan, yakni Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Keberhasilan dari perencanaan program diklat dapat diukur dari realisasi pelaksanaan perencanaan program diklat meliputi ketepatan jenis diklat yang dilaksanakan, jumlah peserta, serta dampak yang diperoleh peserta diklat. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan program diklat untuk meningkatkan keberhasilan melalui langkah-langkah agar lebih tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan peluang-peluang yang sudah direncanakan.

Perencanaan merupakan langkah utama yang sangat penting dalam terlaksananya keseluruhan proses manajemen agar sumber daya dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek utama dalam perencanaan yaitu penetapan tujuan pokok dari program yang akan dilaksanakan agar terlaksana sesuai dengan tujuan tersebut. Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) mempunyai tujuan untuk memberikan bekal pendampingan keluarga untuk mencegah remaja yang belum menikah atau akan menikah. Pendampingan keluarga tersebut dilakukan tiga bulan sebelum menikah untuk mencegah untuk meminimalisir anak stunting yang dilihat dari kesehatan dan asupan makanan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam pengelola pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat menjadi bahan penilaian dalam pengelolaan pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “Manajemen Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Manajemen pengelolaan Diklat Tim Pendamping Keluarga di BKKBN DIY ditinjau dari fungsi manajemen yang dimulai dari kegiatan perencanaan diklat, penyusunan media dan sumber bahan diklat, kegiatan pelaksanaan diklat dan yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi diklat yang dilaksanakan di BKKBN DIY.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menyajikan menggambarkan hasil data yang diperoleh dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY yang terletak di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Subjek pada penelitian ini yaitu staf penyelenggara diklat dan sub koor program kerja di bidang pendidikan dan pelatihan di BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri dengan pedoman wawancara.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi kami laksanakan secara langsung dengan meninjau atau mengamati mengenai data-data yang dibutuhkan dalam merencanakan serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Wawancara dilakukan dengan staf penyelenggara diklat dan subkooor program kerja di BKKBN DIY.

Dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya-karya. Dari penelitian data yang didapat dari dokumen adalah data yang berasal dari staf penyelenggara diklat dan subkooor program kerja.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles Huberman (1984) yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data, untuk memilih, memisah, menyederhanakan dari data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam reduksi data peneliti merangkum dan memilih untuk memfokuskan pada hal penting meliputi hasil wawancara dengan staf penyelenggara diklat dan subkooor program kerja diklat di BKKBN DIY.
2. Penyajian data, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi atau uraian untuk menyajikan reduksi data dari hasil menghubungkan data-data yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi sebuah kesimpulan yang mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam hal ini peneliti memahami dan menganalisis untuk memperoleh kesimpulan bagaimana manajemen pengelolaan diklat di BKKBN DIY.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang lain. Selain itu juga menggunakan Triangulasi Metode yaitu membandingkan data dilihat dari analisis dari ketiga teknik yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target pencapaian penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024, Presiden menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting. Dalam mendukung hal tersebut BKKBN membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai upaya pelaksanaan rencana aksi nasional. Wardita, Suprayitno, & Kurniyati (2021), mengungkapkan bahwa kejadian stunting di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan negara berpendapatan menengah. Dengan

demikian, melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 pemerintah menyusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. Adapun kelompok sasaran pendampingan berdasarkan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 – 59 bulan.

Pendidikan dan pelatihan pada umumnya yaitu serangkaian kegiatan yang dipersiapkan untuk meningkatkan kinerja sdm dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasan Basri dan Rusdiana (2015 : 29) bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan dan intelektual. Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan sekelompok tenaga yang terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin atau calon pasangan usia subur, keluarga dan keluarga yang berisiko Stunting yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting. Tim pendamping keluarga (TPK) di BKKBN DIY bertujuan untuk memberikan bekal pendampingan keluarga bagi masyarakat yang akan menikah atau belum menikah dalam rangka menurunkan angka stunting.

Dalam kegiatan pelatihan, manajemen digunakan agar pembelajaran yang dilaksanakan terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan demikian langkah-langkah manajemen yang dilakukan adalah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta evaluasi atau tindak lanjut (Alim Harun, 2014). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kegiatan pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan tim pendamping keluarga mencakup perencanaan, pelaksanaan proses diklat, dan pengawasan diklat terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta evaluasi program diklat untuk

mengetahui apakah program diklat dapat mencapai tujuan awalnya.

1. Perencanaan Diklat

Diklat Tim Pendamping Keluarga di BKKBN DIY diawali dengan tahap perencanaan yang meliputi kegiatan analisis kebutuhan diklat, merumuskan tujuan diklat, menyusun rencana pelatihan, dan persiapan administrasi. Analisis kebutuhan dilakukan oleh beberapa staff pengelola diklat dan penyelenggara diklat yang dilakukan secara rutin untuk menganalisa kebutuhan yang tepat. Dalam menentukan tujuan diklat dilakukan dengan beberapa partisipan dan staff di BKKBN DIY untuk merumuskan dan menyusun tujuan diklat agar sesuai dengan analisa kebutuhan yang dilakukan sebelumnya.

Perencanaan selanjutnya yaitu penyusunan bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tim pendamping keluarga dalam melaksanakan kegiatan pendampingan. Berdasarkan hasil penelitian Brisma Renaldi (2016) dapat diketahui bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah menerapkan dan memiliki kompetensi yang baik sub kompetensi menyusun bahan ajar. Bahan ajar yang disusun berupa modul yang dikembangkan yaitu pengembangan modul yang merupakan hasil dari analisis kebutuhan diklat yang ada serta pengembangan modul dari modul pemberian pusat, dalam prosesnya menyesuaikan dan menginovasi modul dari pusat sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Gerlach dalam Wina Sanjaya (2014), menjaskan bahwa media pembelajaran secara umumnya meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa widyaiswara di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung penyampaian bahan ajar dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang sering digunakan yaitu aplikasi Elsimil, E-modul, aplikasi Learning Manajemen Sistem (LMs) dan powerpoint. Media pembelajaran

lain berupa poster pintar dan alat peraga lain yang telah disediakan.

Pengorganisasian dalam pengelolaan diklat di BKKBN dilakukan dengan pembentukan tim pendamping keluarga yang dilakukan oleh Training of Fasilitator (TOF) yang berjumlah 11 orang dari berbagai kabupaten. Untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di setiap kelurahan. Setelah pemebentukan tim selanjutnya diadakan rapat persiapan sebagai wadah untuk merancang semua kegiatan diklat yang bertujuan untuk memperlancar jalannya kerjasama, dan yang terakhir dibuat jadwal dan dilakukan koordinasi baik internal dan eksternal yang bertujuan untuk mengatur jalannya diklat dan hubungan kerjasama sebagai sebuah team work. Dalam menjalankan tugasnya tim pendamping keluarga bekerjasama dengan Bidan dari Desa atau Kelurahan atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya untuk mengoptimalkan pendampingan pada para calon pengantin ataupun keluarga.

Adapun kriteria atau ketentuan anggota Tim Pendamping Keluarga untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya, sebagai berikut:

- a. Bidan, dengan kriteria: 1) minimal memiliki Ijazah pendidikan bidan; 2) memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 3) memiliki kemampuan menggunakan gadget.
- b. Kader atau Pengurus TP PKK Tingkat Desa/Kelurahan, dengan kriteria: 1) memiliki SK atau Surat Tugas sebagai pengurus atau anggota PKK; 2) berdomisili di desa yang bersangkutan; 3) memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 4) memiliki kemampuan menggunakan gadget.
- c. Kader KB, dengan kriteria: 1) merupakan PPKBD / Sub PPKBD / Kader Poktan / Tenaga Penggerak Desa/Kader KB di Desa/Kelurahan; 2) memiliki SK atau Surat Tugas sebagai pengurus atau anggota IMP/kader KB; 3) berdomisili di desa yang bersangkutan; 4) memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; 5) memiliki kemampuan menggunakan gadget.

Komposisi dan kriteria yang telah dijelaskan diatas bersifat tidak mengikat dan dapat disesuaikan dengan kondisi tenaga yang ada dimasing-masing daerah tanpa mengurangi esensi arah kebijakan dan strategi dari pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa atau Kelurahan.

2. Pelaksanaan Diklat

Tim pendamping bertugas melaksanakan deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau mencegah pengaruh bila terdapat faktor risiko stunting di suatu keluarga. Tugas pokok dari Tim Pendamping Keluarga yaitu melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki kerawanan terhadap stunting. Tim pendamping keluarga atau TPK akan memberikan edukasi, konseling, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada keluarga-keluarga yang berisiko, baik dari aspek intervensi spesifik maupun intervensi sensitive yang berpengaruh terhadap kemunculan kasus-kasus stunting.

Tim TPK yang terdiri dari Kader KB dan Kader PKK adalah bagian dari komunitas masyarakat di suatu wilayah yang ada dalam lingkungan tempat tinggal keluarga-keluarga yang didampingi, yang sudah saling mengenal sehingga terjadi komunikasi yang efektif dalam pendampingan. Menurut Kurniawati & Ardiansyah (2022), bahwa Kader TPK harus bisa melakukan pemetaan kondisi lingkungan di sekitar mereka, untuk mengenali situasi masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya, kader TPK akan mendatangi keluarga yang diindikasi memiliki balita stunting atau balita yang berisiko mengalami stunting. Jika mengetahui adanya data positif tentang balita stunting atau balita yang berisiko mengalami stunting, kader TPK kemudian akan menghubungi petugas kesehatan terkait untuk melakukan tindakan lebih lanjut guna pencegahan dan penanganan kejadian stunting.

Adapun tugas khusus yang harus dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, antara lain:

- a. Melakukan skrining 3 bulan pra nikah kepada calon pengantin untuk

mengetahui faktor resiko stunting, sebagai upaya menghilangkan faktor resiko tersebut.

- b. Melakukan pendampingan kepada semua bumil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB pasca salin dan melakukan rujukan bila diperlukan.

Dalam melakukan tugasnya dalam pendampingan kepada calon pengantin ataupun keluarga-keluarga di daerah setempat Tim Pendamping Keluarga memanfaatkan aplikasi Elsimil sebagai media atau bahan ajar yang digunakan untuk membantu proses pendampingan. Aplikasi Elsimil ini adalah wujud inovasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Elsimil merupakan aplikasi berbasis Android yang ditujukan bagi para calon pengantin agar mereka menginput data-data dasar kondisi fisik dan kesehatan yang didesain untuk diolah oleh aplikasi dan menghasilkan kesimpulan, apakah calon pengantin tersebut ideal atau belum ideal untuk hamil dan melahirkan. Bila belum ideal, perkawinan tetap dapat dilaksanakan namun disarankan untuk menunda kehamilan sampai upaya perbaikan kondisi kesehatan berhasil mencapai kondisi ideal untuk hamil.

Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan siap Hamil) diluncurkan di Kabupaten Bantul oleh Menteri Agama dan Kepala BKKBN RI pada 11 Maret 2022. Tujuan utama aplikasi ini yakni mendeteksi dini kesehatan calon pengantin untuk mengetahui resiko melahirkan bayi stunting. Aplikasi ini dapat diakses di Playstore maupun Appstore, sehingga para penggunanya juga dapat mengakses dan memperoleh informasi seputar pernikahan dan keluarga secara fleksibel, dimana saja, dan kapan saja. Didalam aplikasi Elsimil terdapat scoring otomatis untuk menentukan apakah kuesioner yang diisi oleh calon pengantin memperoleh hasil ideal atau berisiko. Jika hasil dari kuisisioner menyatakan berisiko maka nantinya akan menjadi panduan Petugas Pendamping untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin.

Pendampingan tersebut dapat berupa edukasi dan juga intervensi berupa pemberian suplemen berdasarkan kebutuhan calon pengantin.

Selain itu, Tim Pendamping keluarga bersama Penyuluh KB juga menggunakan media Poster Penting yang dikembangkan oleh BKKBN bersama 1000 Days Fund. Poster penting ini merupakan poster dinding yang ditempel di dinding atau tembok dengan letak pengaturan tertentu. Pada bagian bawah poster harus terpasang tepat 47 cm di atas lantai, karena poster ini sekaligus dapat digunakan sebagai alat pantau atau alat ukur tinggi badan anak, yang dilengkapi dengan indikator tinggi minimal per-umur tertentu anak dalam bulan. Sedangkan pada bagian atas poster yang berwarna hijau dapat digunakan sebagai pengukur karena lebarnya 23,5 cm (diukur dua kali lebar bagian hijau). Poster dibedakan dengan indikator tinggi minimal bagi anak laki-laki di bagian kanan poster dengan warna biru, sedangkan di bagian kiri untuk anak perempuan dengan warna pink. Poster pintar ini dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang menarik dan cerah yang disukai anak-anak.

Selain sebagai pemantauan tinggi badan, Poster Penting juga berisi tiga pesan kunci mengenai stunting yang disampaikan secara ringkas dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Anak stunting berarti anak yang mengalami gagal tumbuh optimal, yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka panjang. Pesan kedua mengenai dampak stunting selain kekerdilan atau pendek. Menurut Pem (2016) bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan anak terlalu pendek untuk usianya.

Widanti (2017) menyatakan bahwa stunting sebagai salah satu bentuk manifestasi dari malnutrisi (kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi maupun nutrisi) yang berkaitan dengan berbagai faktor sebagai penyebabnya. Selain tidak memiliki tinggi badan yang sesuai umurnya, stunting juga dapat mengakibatkan kecerdasan anak kurang berkembang karena pertumbuhan

otaknya terganggu. Disamping itu anak akan mudah terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya yang lemah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kemenkes (2018) bahwa stunting dapat menyebabkan perkembangan kognitif atau kecerdasan, motorik, dan verbal berkembang secara tidak optimal, peningkatan risiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, peningkatan biaya kesehatan, serta peningkatan kejadian kesakitan dan kematian.

Mekanisme dan langkah kerja Tim Pendamping Keluarga dalam melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:

- 1) Mekanisme Kerja Tim Pendamping Keluarga
 - a) Tim Pendamping Keluarga melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan pemantauan/pengawasan kepada keluarga termasuk Calon Pengantin atau Calon Pasangan Usia Subur dan/atau keluarga berisiko stunting serta melakukan pemantauan kepada sasaran prioritas untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting.
 - b) Memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap tenaga dalam Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagian peranan, yaitu : a) Bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan. b) Kader/Pengurus TP PKK Tingkat Desa/Kelurahan sebagai penggerak dan fasilitator (mediator) pelayanan-pelayanan bagi keluarga. c) Kader KB sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- 2) Langkah Kerja Tim Pendamping Keluarga
 - a) Langkah pertama, Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkaitan dengan rencana kerja, sumber daya, pemecahan

kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan.

- b) Langkah kedua, Pelaksanaan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan Stunting sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kerangka percepatan penurunan Stunting.
- c) Langkah ketiga, Tim Pendamping Keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga yang berisiko Stunting sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam upaya percepatan penurunan Stunting. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui sistem aplikasi (Elsimil) atau manual. Menurut Lisatriana dkk (2022) menyatakan bahwa bahwa tugas pencatatan dan pelaporan menjadi tugas dari tim pendamping keluarga, khususnya kader KB. Peran penyuluh KB dalam hal ini adalah sebagai manager data yang mengelola data kinerja dari tim pendamping keluarga.

3. Evaluasi Diklat

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana para Penyuluh KB dan juga TPK mengimplementasikan pengetahuan dan ketrampilan yang sudah diperoleh saat pelatihan untuk pendampingan kepada calon pengantin, keluarga yang mempunyai bayi di bawah dua tahun stunting maupun keluarga yang berisiko stunting yang ada di wilayahnya. Dalam hal tersebut, tugas TPK sangat penting, karena Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas mendampingi keluarga yang memiliki bayi dibawah umur dua tahun, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan juga calon pengantin, dalam upaya pencegahan maupun pengurangan angka stunting.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara yang disusun oleh tim evaluasi dengan tiga tujuan pokok, yaitu pertama mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelatihan

dengan indikator antara lain kemudahan akses materi pembelajaran dan pemahaman terhadap tiap materi diklat. Evaluasi diklat dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi bagi pengambil keputusan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, meningkatkan, atau mengakhiri program, serta rekomendasi. Selain itu, penilaian akan mengukur efektivitas keberhasilan pelaksanaan pelatihan (Widyastuti & Purwana, 2015).

Selanjutnya evaluasi juga bertujuan mengukur perubahan perilaku setelah mengikuti diklat, yang ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan TPK dalam melakukan pendampingan di lapangan, kemampuan mengaitkan materi diklat untuk menunjang tugas pendampingan, dan perubahan perilaku sampai kepada perilaku sasaran yang didampingi. Evaluasi juga digunakan untuk mengetahui secara khusus penerapan penggunaan alat bantu pendampingan yang merupakan inovasi BKKBN, yaitu Poster Pencegah Stunting (Poster Penting atau biasa disebut Poster Pintar).

SIMPULAN

Pengelolaan diklat pada Tim Pendamping Keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan diklat pada TPK meliputi analisis kebutuhan diklat, merumuskan tujuan diklat, menyusun rencana pelatihan, penyusunan bahan ajar, penggunaan media pembelajaran, dan pengorganisasian. Pelaksanaan diklat yang dilakukan pada Tim Pendamping Keluarga meliputi tugas TPK yaitu melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki kerawanan terhadap stunting, penggunaan aplikasi Elsimil dan LMS sebagai media atau bahan ajar yang digunakan untuk membantu proses pendampingan, Tim Pendamping keluarga bersama Penyuluh KB menggunakan media Poster Penting sebagai alat pemantauan tinggi badan dan tiga pesan kunci mengenai stunting, serta mekanisme dan langkah kerja Tim Pendamping Keluarga. Evaluasi diklat

pada Tim Pendamping Keluarga meliputi peningkatan kemampuan TPK dalam melakukan pendampingan di lapangan, kemampuan mengaitkan materi diklat untuk menunjang tugas pendampingan, dan perubahan perilaku sampai kepada perilaku sasaran yang didampingi

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. & Rusdiana (2015). Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Bandung: CV Pustaka Setia
- Harun, A. (2014). Pengelolaan Pelatihan Dalam Organisasi (Tinjauan Teori Pembelajaran Orang Dewasa). AH Pamungkas. Sumbarprov. Go.Id.
- Kemendes. 2018. Cegah Stunting Itu Penting. WartaKESMAS
- Kurniawati, N. & Ardiansyah, R.Y. (2022). Peningkatan Pengetahuan Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) Kota Mojokerto Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Melalui Transfer Iptek. JURNAL BHAKTI CIVITAS AKADEMIKA. Volume V, Nomor 1.
- Lisatriana, B., et al. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Volume 12 Nomor 3.
- Peraturan Presiden RI No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Jakarta
- Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Jakarta.
- Wardita, Y., Suprayitno, E., dan Kurniyati, E. M. (2021). Determinan Kejadian Stunting pada Balita. Jurnal Ilmu Kesehatan (Journal of Health Science), 6 (1).
- Widanti, Y. A. (2017). Prevalensi, Faktor Risiko, dan Dampak Stunting Pada Anak Usia Sekolah. JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Industri Pangan UNISRI), 1 (1).

Widiyastuti, U. dan Purwana E. S. (2015).
Evaluasi Pelatihan (Training) Level II
Berdasarkan Teori The Four Levels

Kirkpatrick. Jurnal Pendidikan
Ekonomi dan Bisnis (JPEB), 3 (2), 119-
128